

ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI INDONESIA (SUATU PENDEKATAN MAQHASID SYARIAH)

(Rukiah¹, Amiur Nuruddin, Saparuddin Siregar²)

IAIN Padangsidempuan¹, UIN Sumatera Utara²

e-mail: rukiahlubis@iain-padangsidempuan.ac.id, amiurstbatuah@yahoo.com,
Saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to analyze human development index in Indonesia by using the Maqhasid Shariah approach. The research sample is 33 provinces in Indonesia. The research method uses descriptive quantitative analysis. The results showed that the Islamic Human Development Index in all provinces in Indonesia is still low and there is still a gap. The role of non-material welfare (NMW) in the formation of the Islamic Human Development Index (IHDI) is still dominant compared to material welfare (MW). Research recommendations are (1) for local and central government need to increase the role of fiscal policy in education and health in order to achieve quality human beings who will impact on the ability to improve material welfare (MW) of the community. (2) The government must continue to be able to increase economic growth that drives the real sector in the regions and to optimize of material welfare. Reviewing development measures using the *Maqhasid Sharia* approach to create *Maslahah*.

Keyword : *Islamic Human Development Index, Maqhasid Syariah*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Index Pembangunan Manusia di Indonesia dengan pedekatan *Maqhasid Syariah*. Sampel penelitian adalah 33 provinsi di Indonesia. Metode penelitian memakai analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan *Islamic Human Development Index* di semua provinsi di Indonesia yang masih rendah dan masih terjadi kesenjangan. Peran Kesejahteraan non material (*Non Material Welfare*) dalam pembentukan *Islamic Human Development Index (IHDI)* lebih dominan dibanding kesejahteraan material (*Material Welfare*). Rekomendasi penelitian adalah (1) perlunya pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan peran kebijakan fiskal bidang pendidikan dan kesehatan guna tercapainya manusia berkualitas yang akan berimbas pada kemampuan dalam peningkatan kesejahteraan material (*Material Welfare*) masyarakat. (2) Pemerintah harus

terus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan sektor Riil di daerah dan pusat agar kesejahteraan material meningkat. Meninjau kembali ukuran-ukuran pembangunan dengan pendekatan *Maqhasid Syariah* agar tercipta *kemaslahatan*.

Keyword : *Islamic Human Development Index, Maqhasid Syariah*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perbaikan berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi¹ Indikator tercapainya pembangunan adalah pendapatan yang tinggi dan merata, tersedianya lapangan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, berkembangnya teknologi, dan sebagainya. Setidaknya ada tiga komponen dasar atau nilai inti sebagai konsep dan pedoman praktis dari pembangunan yaitu kecukupan, harga diri dan kebebasan dari sikap menghamba²

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2015 telah mencanangkan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) sebagai kesepakatan pembangunan global, gerakan yang merupakan kelanjutan gerakan MDGs (*Millennium Development Goals*) yang dicanangkan sebelumnya. SDGs disepakati kurang lebih 193 kepala negara yang hadir dan dari Indonesia dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla turut mengesahkan agenda SDGs tersebut. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target, merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (2016 hingga 2030) Tujuan yang dicanangkan adalah berlaku untuk semua negara tanpa kecuali. Setiap negara memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Target dari gerakan itu adalah tercapainya kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan dalam jangka panjang bagi seluruh penduduk bumi, target utama yang ingin dicapai adalah kemaslahatan ummat manusia. Begitu pentingnya proses pembangunan berkelanjutan, sehingga badan dunia PBB membuat agenda *map road* bagi seluruh penduduk dunia agar terjadi keseragaman pemahaman dan tujuan dari pembangunan dunia. Salah satu ukuran pembangunan yang berusaha menilai

Sejak tahun 1990 an *United Nations Development Program* (UNDP) telah mengeluarkan laporan perbandingan pembangunan ekonomi disuatu negara dalam *Human Development Report* tema sentral dari laporan ini adalah pembentukan

1 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi* (Penerbit : Erlangga Jakarta 2006) edisi Sembilan jilid 1 h.26

2 Ibid. h. 28

dan penajaman ulang Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)*. Index ini mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 sampai 1. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup³.

HDI dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.⁴ Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi masalah pembangunan yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu adanya standar hidup yang masih rendah ditunjukkan dengan tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kondisi kesehatan yang buruk dan kurang memadainya sistem pendidikan, dari sisi sumber daya manusia dapat dilihat adanya tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi, pasar yang tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia.⁵

Berdasarkan publikasi *Human Development Index 2017*. Index pembangunan manusia Indonesia berada pada peringkat 116 dunia dengan posisi IHD menengah dengan index 0.694 masih berada dibawah negara Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia, tiga negara terakhir berada pada HDI tinggi dan sangat tinggi.⁶ Kondisi HDI Indonesia ini sebenarnya menggambarkan situasi pembangunan pada provinsi –provinsi yang ada di Indonesia, adanya kesenjangan pembangunan dari berbagai daerah ditunjukkan HDI yang tidak merata. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

3 Sejak tahun 1990 organisasi pembangunan dunia dibawah payung bank dunia dan amerika Serikat, telah memperkenalkan konsep pembangunan manusia dan mempromosikan konsep itu dalam banyak publikasi rutin mereka. Di dalamnya sebagai penemu dan penganalisis utama oleh pemenang nobel bidang ekonomi Amartya Sen

4 Badan pusat statistik 2016.. lihat juga.. Miraç Eren and Selahattin Kaynak. *An evaluation of EU member states according to human development and global competitiveness dimensions using the multi-period grey relational analysis (MP-GRA) technique* Application Vol. 7 No. 1, 2017 pp. 60-70 © Emerald Publishing Limited. h. 61

5 *Ibid.*..Todaro and Smith h. 60-61

6 *Human Development Index Statistical* (UNDP Report 2018) h. 22

Tabel I.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)
 Pada Provinsi – provinsi di Indonesia Tahun 2017

No	Status Pembangunan	Kriteria	Jumlah Provinsi	Nama - Nama provinsi
1.	$0 \leq \text{HDI} \leq 59,99$	Rendah	1	Papua
2.	$60,00 \leq \text{HDI} \leq 69,99$	Sedang	18	Sulawesi Barat, Papua Barat, NTT, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara,
3.	$70,00 \leq \text{HDI} \leq 79,99$	Tinggi	14	Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, DI. Yogyakarta
3.	$80 \leq \text{HDI} \leq 100$	Sangat Tinggi	1	DKI Jakarta
4.	Total		34	Provinsi

Sumber: BPS Indonesia 2018 (data diolah)

Dari tabel I.1 diatas kita bisa melihat bahwa ada 1 provinsi yang memiliki HDI sangat tinggi, 14 provinsi berada pada kriteria HDI tinggi, 18 provinsi pada kriteria HDI sedang, dan 1 provinsi berada pada posisi HDI rendah. HDI yang peringkat sedang, di dominasi provinsi yang ada di wilayah timur Indonesia, sedangkan HDI yang peringkat tinggi dan sangat tinggi di dominasi provinsi yang ada di daerah barat yaitu Jawa dan Sumatera, sebahagian Sulawesi dan kalimantan. Dari segi persentase jumlah provinsi yang memiliki HDI sedang sebesar 52 %, HDI tinggi, sementara 41 % HDI Rendah dan Sangat Tinggi masing-masing sebesar 2,9 %. Kondisi ini bisa kita simpulkan bahwa pembangunan manusia Indonesia masih sangat jauh kesenjangannya di berbagai daerah di Indonesia jika ditinjau dari pendekatan pengukuran pembangunan Manusia dengan pendekatan *Human Development Index* (HDI). Terbukti bahwa hampir setengah dari provinsi yang ada di Indonesia masih

memiliki HDI rendah dan sedang walaupun capaian-capaian indikatornya memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun akan tetapi pemerataan HDI di seluruh Indonesia masih rendah.

Indeks Pembangunan Manusia yang diperkenalkan UNDP adalah salah satu alat ukur yang disepakati di dunia berdasarkan peringkat, tentunya ini belum komprehensif jika dipandang dari tinjauan ekonomi islam untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Indikator-indikator masih mengacu pada pencapaian kesejahteraan yang sifatnya materil dan sosial. Islam sebagai agama yang sudah sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan tuntunan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya diukur dari pencapaian dunia akan tetapi juga kesejahteraan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah (2: 172)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*⁷

Pola – pola pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang diusung secara konvensional sungguh sangat jauh dari tujuan dan cita-cita yang ingin diraih dalam islam yaitu *Maqāsid Syari'ah*, yang bermuara pada tujuan *Maslahah*. keberhasilan pembangunan hanya dinilai dari aspek fisik dan pencapaian materi saja sebagai standar kesejahteraan dan mengesampingkan aspek mental dan spiritual di dalamnya. Sementara ajaran islam adalah ajaran yang mengatur semua sendi kehidupan, dapat menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul, termasuk juga persoalan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Ajaran islam itu “*salihun likulli zaman wa likulli makan* (cocok untuk semua jaman dan tempat.) walaupun wahyu sudah turun lebih 14 abad yang lalu semenjak wafatnya Rasulullah, dalam hal ini *maqhasid syariah* sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan itu.⁸

Konsep pembangunan dengan perspektif ekonomi islam sesungguhnya jadi alternative dalam merumuskan kembali arti dari nilai pembangunan manusia seperti yang tertuang dalam pernyataan ini. Pandangan islam terhadap pembangunan ekonomi adalah sangat unik serta khas dan sangat berbeda dengan pandangan konvensional, khususnya pada pokok yang sangat dasar. Tujuan pembangunan

7 QS Al-Baqarah (2: 172)

8 Muhammad Salim al-Awwa, *Daur al-Maqasid fi al-Tasyri'at al-Mu'asirah*. (Kairo: al-Maqasid Research Center, 2006).

ekonomi dalam pandangan islam adalah untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh baik dunia dan akhirat dan disebut dengan *falāh*".⁹.

Kata kesejahteraan sangat banyak disinggung dalam Al - Quran karena begitu pentingnya untuk dicapai oleh manusia sebagai tujuan diciptakan oleh Allah. Kata *falāh* dan turunannya disebutkan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur'an. Kata lain *fawz* sebagai sinonim dari *falah* telah digunakan sebanyak 29 kali beserta turunannya. Dan ini juga yang dikumandangkan oleh muadzin untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari, menunjukkan begitu pentingnya menggapai *falah* dalam pandangan islam]."¹⁰

Pentingnya *falah* sebagai tujuan manusia di dunia ini menjadi landasan dasar bahwa manusia harus menjaga amanah untuk memelihara alam dan seisinya sebagai tuntutan tugasnya sebagai *khalifah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS : Al-Ahzab (33:72) sebagai berikut :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)

"*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat dzalim dan Amat bodoh.*"¹¹

Betapa beratnya tugas manusia dimuka bumi ini sehingga langit dan bumi enggan untuk menerima amanat itu, dikarenakan sifat manusia yang rakus dan lebih mementingkan hawa nafsunya sehingga sering berbuat zholim dan mengkhianati tugasnya sebagai pemakmur bumi.

Definisi Pembangunan ekonomi dalam islam adalah sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia baik materi dan non materi. Ia merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di didalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan reorientasi keseluruhan system sosial dan ekonomi, dan peningkatan spritualitas, menurut ajaran islam¹²

9 Hendri Anto MB." *Introduction an Islamic human development Indeks (I- HDI) to Measure Development in OIC Countries*" (IRTI journal, Vol. 19 No. 2 2010) h.70

10 Umar Chapra. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah*. (Working paper, researcGate 2008).h.1

11 QS : Al-Ahzab (33:72)

12 Sadeq, Abul Hasan, *Development Issues in Islam*, (International Islamic University Malaysia 2016)

Pembangunan ekonomi dalam islam juga menitik beratkan pada keadilan sosial dan memperhatikan sekali kesejahteraan manusia. Pandangan islam pada pembangunan berpusat pada tujuan yang paling tinggi adalah *Maqāṣid Syarī'ah* yang terdiri dari tiga tujuan dasar yaitu, pendidikan individu, menegakkan keadilan dan memberi jaminan kesejahteraan untuk semua atau *Maslahah*. *Syarī'ah* lebih dari sekedar bicara hukum, akan tetapi juga petunjuk total dan mengangkat nilai, norma serta petunjuk umum lainnya yang menjamin kesejahteraan manusia secara total. Dalam dirkursus ekonomi islam, *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan kerangka utuh yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang diwakili oleh konsep *maslahah*.¹³

Berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah*, konsep islam dalam pembangunan manusia berpusat pada dua aspek yaitu material dan moral. Islam mengenal dua kebutuhan manusia yaitu pertama, keduniaan yaitu untuk konsumsi yang sifatnya materi dan fasilitas untuk memproduksinya sebanyak- banyaknya. Kedua spiritual yaitu moral, etik, dan aspek sosial dalam kehidupan, dan ini sepenuhnya diizinkan dan diekspresikan secara bebas untuk memenuhi desakan kemanusiaan dengan pilihan secara moral dan ideal, etika dan sosial, serta berusaha untuk meraihnya. Untuk menciptakan tidak hanya yang disediakan oleh alam, tetapi juga sebagai sesuatu keindahan di dunia, dan juga puncak ekspresi cinta. Untuk mewujudkannya diperlukan pengorbanan yang tinggi. Kedua jenis kebutuhan tersebut bisa menjadi sesuatu konflik, tapi mereka dasarnya saling berhubungan untuk mempertahankan keberadaan manusia.¹⁴

Pengukuran pembangunan manusia dengan pendekatan *Maqhasid syariah* telah banyak dikemukakan oleh para memiki-pemikir islam seperti Al-Ghazali (1937), Ibnu Ashur (2001) Dusuki dan Abozaid (2007) Al - Syatibi (2004), Alhabsi dan Hassan (1996), Chapra (2008), dan Choudhury (2014). Dimana para ulama klasik khususnya Al-Ghazali dan Al-Syatibi merangkum dalam lima penjagaan yang pokok dalam kehidupan atau dengan istilah *al-kulliyah al-khamsah* yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*)¹⁵

13 Ruzita Mohd Amin dkk. *The Integrated Development Index (I- Index) a new comprehensive approach to measuring human Development*, (ResearchGate , Blomsbury Qatar Foundations journal vol.2 thn 2015)h. 160.. Lihat juga Abbas Mirakhor, "A Note on Islamic Economics," (Islamic Research and Training Institute, IDB Lecture Series No.20. Islamic Development Bank , 2007), h.26

14 Zubair Hasan, " Review of M. U. Chapra's 'Islam and Economic Development' IJUM Journal of Islamic Economics, 4(1 and 2) 1995: 61-70. Lihat juga Zubair Hasan, "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning Implications and Policy Concerns", (Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 2006)Vol. 19, No. 1, h: 3-18

15 Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 174. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 2, h. 324

Maqhasid Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Urgensitas *maqasid syariah* tersebut mendorong para ahli teori hukum Islam menjadikan *maqasid syariah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*) sebagai tujuan inti dari Syariat Islam diturunkan ke muka bumi. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid syariah* tersebut adalah *maslahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahah*.

Konsep *maslahah* yang menjadi muara dari *maqhasid syariah* menurut Al Ghazali (w 505 H) dibagi menurut kekuatan dan kejelasannya bukan hanya beliau meneruskan pemikiran gurunya al-Juwaini (Imam al-Haramain, w. 478H) akan tetapi juga mengkritisi, menambahkan dan mengembangkan dalam karyanya *al-Mankhul min ta'liqat al-Usul*, dimana *al-masalih* itu berada pada tingkatan *daruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat* serta *al-tazyinat*. Pengklasifikasian *al-maqasid* produk al-Ghazali ini menjadi referensi para teorikus ushul al-fiqh pasca al-Ghazali¹⁶

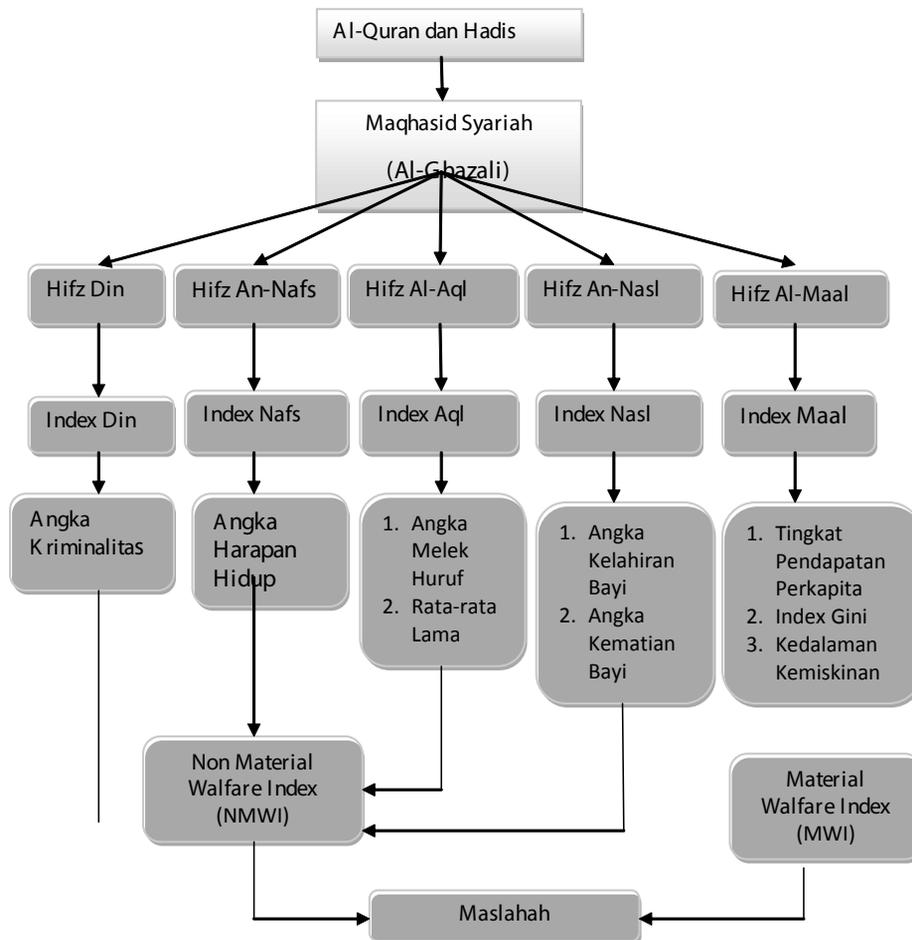
Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan manusia akan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi dan pembangunan juga tidak dapat dilepaskan dari konsep pencapaian *maslahah*.

Dan yang paling mutakhir adalah pengukuran pembangunan manusia dengan pendekatan matematik sebagaimana hal-nya pengukuran *Human Development Index* (Index Pembangunan Manusia) yang memakai tiga komponen yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita, khususnya aspek daruriyat. Untuk Index pembangunan manusia Islami *I-HDI* yang diambil dari konsep *maqhasid* ada penambahan Indikator yaitu tingkat Religiusitas pada aspek *Hizf al din*, yang bisa diwakili oleh Tingkat Persepsi Korupsi (*Corruption Perseption Index*) atau juga tingkat kriminalitas (*Total Crime Index*) di suatu wilayah. Pengukuran Index Pembangunan Manusia Islami (I-HDI) pernah diteliti oleh Hendri Anto MB (2010) dengan memakai Indikator HDI secara umum dan menambahkan aspek pencapaian index itu dari pendekatan *Maqhasid Syariah* Al-Ghazali, dengan sampel penelitian anggota negara-negara OIC (*Organisation Islamic Countries*). Berikut dibawah ini Kerangka pikir *Islamic Human Development Index* dan indikatornya

16 Ismail al-Hasani, *Nadhariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad al-Thahir bin 'Asyur*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)h. 45-46. Lihat juga Ahmad al-Risuni, *Nadhariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)h. 52-56

Gambar I.1

Kerangka Konsep dan Indikator *Islamic Human Development Index*



Sumber : Haqiqi Rafsanjani (2014) Hendri Anto (2010)

Dengan adanya pengukuran pembangunan manusia islami (I-HDI) yang lebih holistik mencakup semua aspek kebutuhan manusia yang berlandaskan *Maqhasid Syariah* diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan konsep yang lebih menyeluruh terhadap pola-pola pembangunan yang akan dilakukan khususnya negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. *Islamic Human Development Index* membagi kebutuhan akan kesejahteraan manusia pada dua bagan yaitu Kesejahteraan Material (*Material Welfare*) dan kesejahteraan Non Material (*Non Material Welfare*)

Dengan melihat tingkat *Human Development Index* Indonesia di dunia dan kondisi *Human Development Index* Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki kesenjangan tinggi dan adanya perbedaan capaian maka penulis ingin mengetahui sejauh mana

pencapaian pembangunan manusia islami atau *Islamic Human Development Index* di Indonesia jika memakai pendekatan *maqhasid syariah* Al-Ghazali dan faktor mana yang dominan memberi sumbangsih kepada *Islamic Human Development Index* Provinsi- provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2017

B. METODE ANALISIS

Dengan terpenuhinya indikator- indikator yang dapat mewakili kelima kebutuhan akan tercapainya tujuan *Maqhasid Syariah* maka data - data yang diperoleh berupa data kuantitatif akan dapat dimasukkan pada perhitungan *Islamic Human Development Index* provinsi- provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Rumus *Islamic Human Development Index* bisa dikembangkan sebagai berikut:

1) Index *Ad-Din*/ ID

Index *Ad-Din* akan diwakili oleh indikator data index kriminalitas (*Crime Index*) disetiap provinsi, dengan rumus :

$$\text{Index Kriminalitas} = \frac{\text{Actual crime} - \text{Minimal Crime}}{\text{Maximal Crime} - \text{Minimal Crime}}$$

Dimana :

$$\text{ID} = \text{Index Ad-Din}$$

Actual Crime = Nilai aktual kriminalitas tahun ke i

Min Crime = Nilai aktual kriminalitas terendah tahun ke i

Max Crime = Nilai aktual kriminalitas tertinggi tahun ke i

2) Index *An-Nafs*/ INF

Index *An-Nafs* / INF dicari dengan memakai data tingkat harapan hidup (*life Expectancy Index*) penduduk disetiap provinsi yaitu dengan rumus:

$$\text{INF} = \frac{\text{Actual Life expectancy} - \text{Minimal Life Expectancy}}{\text{Max Life expectancy} - \text{Minimal Life Expectancy}}$$

Dimana :

$$\text{INF} = \text{Index Masa hidup/ Harapan Hidup}$$

Actual Life Expectancy = Tingkat Harapan Hidup tahun ke i

Min Actual Life Expectancy = Tingkat Harapan Hidup minimal tahun ke i

Max Actual Life Expectancy = Tingkat Harapan Hidup Maksimal tahun ke i

3) Index *Al-Aql* / IA

Index *Al-Aql*/ IA memakai data angka melek huruf (*Literacy Index*/LI) dan Rata-rata lama sekolah (*Means Years Schooling Index*/MYSI) dari penduduk setiap provinsi

$$(LI) = \frac{\text{Actual Literacy} - \text{Minimal literacy}}{\text{Actual MYS} - \text{Minimal MYS}} \times \text{Literacy}$$

$$MYSI = \frac{\text{Maximal Mys} - \text{Minimal Mys}}{\text{Maximal Mys} - \text{Minimal Mys}}$$

$$IA = 1/2 (LI) + 1/3 (MYSI)$$

Dimana :

IA = *Index Al-Aql*

LI = *Literacy Index*

MYSI = *Means Years of Schooling* / index rata-rata lama bersekolah

Actual LI = Nilai aktual Index literasi

Min LI = Nilai minimum Index literasi

Max LI = Nilai Maksimum Index Literasi

Actual MYSI = Nilai aktual rata-rata lama bersekolah tahun ke i

Min MYSI = Nilai minimum rata-rata lama bersekolah

Max MYSI = Nilai maksimum rata-rata lama bersekolah

4) Index *An-Nasl* /INS

Index *An-Nasl* /INS ini memakai data angka kelahiran total (*Fertility Index*/FI) dan angka kematian bayi (*Mortality Index*/MI) dari setiap provinsi

$$FI = \frac{\text{Actual FR} - \text{Minimal FR}}{\text{Maximal FR} - \text{Minimal FR}}$$

$$MI = \frac{\text{Actual Mr} - \text{Minimal Mr}}{\text{Maximal Mr} - \text{Minimal Mr}}$$

$$INS = 1/2 (FI + MI)$$

Dimana

INS = *Index An-Nasl*

FI = *Fertility Index*

MI = *Mortality Index*

Actual FI = Nilai aktual angka kelahiran bayi tahun ke i

Min FI = Nilai minimum angka kelahiran bayi tahun ke i

Max FI = Nilai maksimum angka kelahiran bayi tahun ke i

Actual MI = Nilai aktual angka kematian bayi tahun ke i

Min MI = Nilai minimum angka kematian bayi tahun ke i

Max MI = Nilai Maksimum angka kematian bayi tahun ke i

5) *Index Al-Maal/ IM*

Index Al-Maal/ IM memakai data Koefisien Gini Rasio (Gc), angka kedalaman kemiskinan (*Poority Index*), pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Sebelum mencari *Index Al-Maal* maka sebelumnya angka gini Rasio dan kedalaman kemiskinan perlu dinormalkan dengan rumus :

Normalisasi Gini :

$$nGc = 1 - Gc$$

Normalisasi Kedalaman kemiskinan

$$nP_i = 100 - P_i$$

Rumus Index Gini :

$$Index\ Gini\ (G_{ci}) = \frac{Actual\ NGc - Minimal\ NGc}{Maximal\ NGc - Minimal\ NGc}$$

Rumus index kedalaman kemiskinan P_i

$$Poority\ Index = \frac{Actual\ nP_i - Minimal\ nP_i}{Maximal\ nP_i - Min\ nP_i}$$

Setelah kedua index ini diperoleh maka dia akan disebut dengan *Distribution Equity Index (DEI)*

$$DEI = 1/2 (G_{ci} + P_i)$$

Selanjutnya data pengeluaran perkapita disesuaikan menjadi index dengan rumus :

$$Pengeluaran\ Perkapita\ Index = \frac{Actual\ PP - Minimal\ PP}{Maximal\ PP - Minimal\ PP}$$

Dengan dihitungnya *Distribution Equity Index (DEI)* dan pengeluaran perkapita index (PPI) maka akan dapat dihitung *Index Al Maal* dengan rumus sebagai berikut :

$$Index\ Al\ Maal\ (IM) = 1/2 (DEI + PPI)$$

Dimana :

IM = *Index al Maal*

DEI = *Distribution Equity Index*

PPI = *Pengeluaran Perkapita*

nGc = *Nirmalized Gini Coefisient*

Gc = *Gini Coefisient*

Gci = *Gini Coefisient Index*

nPi = *Normalized Poority Index*

P_i = *Poority Index*

Dengan diketahuinya rumus pembentuk I-HDI, maka dapatlah ditarik rumus *Islamic Human Development Index*:

$$I\text{-HDI} = 2/5 (ID) + 1/5 (INF + IA + INS + IM) \times 100 \%^{17}$$

Untuk memperoleh *Material Walfare Index* dan *Non Material Walfare Index* dengan rumus sebagai berikut :

1.) *Material Walfare Index (MWI)*

Material Walfare Index (MWI) memakai *data Index Maal (IM)* terdiri dari *Distribution Equity Index (DEI)* dan *Pengeluaran Perkapita Index (PPi)*

$$MWI = \frac{1}{2} (DEI + PPi)$$

2.) *Non Material Walfare Index (NMWI)*

Non Material Walfare Index (NMWI) memakai data *Index Ad-Dhien (ID)*, *Index An-Nafs (INF)*, *Index Al-Aql (IA)*, *Index Nasl (INS)*

$$NMWI = \frac{1}{4} (ID+INF+IA+INS)$$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan *Islamic Human Development Index* 33 Provinsi di Indonesia Selama 8 tahun, dari tahun 2010 sampai dengan 2017 diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut :

Tabel I.1

Ringkasan peringkat I-HDI provinsi – provinsi di Indonesia

No	Status Pembangunan	Jumlah Provinsi Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	$0 \leq HDI \leq 59,99$	31	28	28	28	27	25	26	26
2	$60,00 \leq HDI \leq 69,99$	-	3	3	3	4	4	3	2
3	$70,00 \leq HDI \leq 79,99$	1	1	1	-	-	2	2	2
4	$80 \leq HDI \leq 100$	1	1	1	2	2	2	2	3

Sumber : data diolah 2019

Dari perkembangan I-HDI provinsi di Indonesia terlihat bahwa daerah- daerah yang berada dalam peringkat I-HDI menengah cenderung stabil dan hanya beberapa provinsi pada tahun tertentu yang mengalami perubahan index dari peringkat

17 Ibid... Hendri Anto.. h..84. lihat juga Haqiqi Rafsani. *Islamic Human Development Index di Indonesia*. (Repository Universitas Brawijaya library. Malang 2014)

menengah ke rendah dan dari peringkat tinggi ke peringkat sangat tinggi. Khusus untuk tahun 2013 dan 2014 ada sekitar 2 provinsi yang index yang sangat tinggi yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Utara, provinsi yang berada di peringkat menengah masih rata - rata didominasi daerah yang berada di pulau jawa dan Sumatera dan sebahagian Sulawesi. Sedangkan untuk tahun 2017 ada perubahan jumlah provinsi yang mengalami peningkatan index dari peringkat tinggi ke sangat tinggi yaitu Jawa Timur. Pengamatan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 Sumatera Utara dan DKI Jakarta adalah dua Provinsi yang paling tinggi *Islamic Human Development Index*- nya. Tinggi rendahnya index ini tidak di dominasi oleh daerah - daerah tertentu yang berada di daerah Barat Indonesia atau Timur khusus untuk peringkat menengah hampir semua daerah bagian Indonesia barat dan timur masuk dalam kriteria menengah. Seperti halnya hasil *Human Development Index* (HDI), index yang paling tinggi didominasi provinsi yang ada di daerah Barat Indonesia. Tinggi rendahnya *Islamic Human Development Index* dibentuk dari fungsi *Material Welfare Index* dan *Non Material Welfare Index* (kesejahteraan material dan non material) dan hasilnya sebagai berikut

Tabel II.2

Ringkasan peringkat *Material Welfare Index* (MWI) Provinsi – provinsi di Indonesia tahun 2010 s/d 2017

No	Status Pembangunan	Jumlah Provinsi Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	$0 \leq \text{HDI} \leq 59,99$	32	31	31	32	32	31	31	31
2	$60,00 \leq \text{HDI} \leq 69,99$	1	2	1	1	-	1	2	1
3	$70,00 \leq \text{HDI} \leq 79,99$	-	-	1	-	1	1	-	1
4	$80 \leq \text{HDI} \leq 100$	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : data diolah 2019

Dari data perhitungan index kesejahteraan Material (*Material Welfare Index*) diperoleh bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki index yang tinggi selama kurun waktu tahun 2012, 2014, 2015 dan 2017, untuk Index menengah diperoleh oleh DI Yogyakarta, artinya ada ketimpangan pendapatan yang tinggi pada setiap provinsi di Indonesia, dari segi tingkat pendapatan, gini rasio dan kedalam kemiskinan. Terlihat provinsi yang *Material Welfare Index* rendah sangat mendominasi hampir 90 %. Untuk Perhitungan kesejahteraan Non Material (*Non Material Welfare Index*) bisa kita lihat pada tabel dibawah ini Tabel II.3

Tabel II.3Ringkasan peringkat *Non Material Welfare Index* (NMWI)

Provinsi – provinsi di Indonesia tahun 2010 s/d 2017

No	Status Pembangunan	Jumlah Provinsi Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	$0 \leq \text{HDI} \leq 59,99$	30	27	25	26	26	26	25	24
2	$60,00 \leq \text{HDI} \leq 69,99$	2	4	6	5	5	5	6	8
3	$70,00 \leq \text{HDI} \leq 79,99$	1	2	2	2	2	2	2	-
	$80 \leq \text{HDI} \leq 100$	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : data diolah 2019

Dari tabel II.3 diatas dapat dilihat, bahwa hanya 2 provinsi yang mendominasi tingkat *Non Material Welfare Index* yang tinggi sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2016, yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Untuk peringkat menengah di dominasi provinsi yang ada dibagian barat dan beberapa daerah timur, pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan jumlah provinsi yang menaik peringkatnya ke posisi menengah. Dari hasil data perhitungan hampir 70 % provinsi di Indonesia berada pada peringkat *Non Material Welfare Index* rendah, selebinya berada dalam kriteria menengah, dan tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi *Islamic Human Development Index* di Indonesia yang hampir didominasi I-HDI rendah menunjukkan bahwa pola –pola pembangunan ekonomi yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya mencapai semua aspek kebutuhan manusia yang berada dalam 5 tujuan *Maqhasid Syariah*, yaitu memelihara agama (*Hifz Din*) Memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), memelihara akal (*Hifz Aql*), memelihara keturunan (*Hifz Nasl*) dan memelihara harta (*Hifz Maal*). Komposisi capaian Kesejahteraan Material (MW) dan Non Material (NMW) menunjukkan bahwa capaian kesejahteraan non material (NMW) masih lebih baik dibanding kesejahteraan material (MW). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan juga tingkat religiusitas sebagai indikator pembentuk Index di beberapa daerah masih lebih dominan dibanding beberapa daerah lain, khususnya yang NMW-nya tinggi yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Utara, untuk NMW menengah masing-masing daerah Maluku, Jawa barat, NTT, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Untuk beberapa provinsi ini kualitas NMW masih lebih baik dibanding sebagian besar provinsi di Indonesia.

Kesejahteraan Material (MW) yang tinggi dan menengah hanya dicapai oleh DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali walaupun indexnya tidak konsisten di sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2017. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa

faktor dominan pembentuk index di Indonesia adalah kesejahteraan no material (*Non Material Welfare*) walaupun tidak dominan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hendri Anto (2010) pada negara-negara OIC yang menyatakan bahwa pembentukan *Islamic Human Development Index* di negara- negara OIC dominan disumbang oleh *Non Material Welfare* (NMW).

Berdasarkan hasil penelitian *Islamic Human Development Index* (IHDI) provinsi di Indonesia dapatlah kita cermati alternatif solusi yang bisa diambil para pembuat kebijakan pembangunan manusia di Indonesia, bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memberi solusi kesejahteraan, bukan pencapaian angka – angka statistik semata yang tidak menyentuh substansi permasalahan kesejahteraan. seperti halnya pertumbuhan ekonomi yang cenderung ditingkatkan akan tetapi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan malah semakin tinggi. Banyak penelitian dan konsep yang bisa memberi solusi seperti Konsep pembangunan yang lebih konkrit pernah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, dalam Umar Chapra *Ibn Khaldun's theory of development* (2008) menurut beliau ada banyak variabel yang dapat dimunculkan dalam model pembangunan ekonomi suatu negara jika ingin mencapai kemaslahatan, yaitu

Kekuatan Pembangunan terdiri dari karakteristik yang dinamis dan terdiri dari berbagai aspek yang multi disiplin. Maksud multidisiplin adalah keterkaitan yang saling berhubungan dengan variabel sosial ekonomi dan politik, termasuk kedaulatan dan kekuasaan politik (G), kepercayaan dan hukum atau syariah(S) rakyat (N), kesejahteraan dan ketersediaan sumber daya (W), Pembangunan (g) dan keadilan (j) dalam siklus dan hal yang saling terkait dan masing- masing saling mempengaruhi¹⁸.

Aspek kepercayaan dan Syariah (S) menjadi sangat penting sekali sebagai landasan moral dari setiap aktivitas pembangunan yang selama ini diabaikan.

Hasil penelitian menunjukkan *Islamic Human Development Index* (IHDI) diberbagai Provinsi tidak merata, Berarti ada yang salah dengan cara dan sistem kita membangun. Pembangunan yang tidak dilandaskan moral dan etik, adalah pembangunan yang hampa seperti halnya yang diungkapkan oleh Abdul Hasan Sadeq (2016)

“Pembangunan ekonomi dalam islam adalah sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia baik materi dan non materi. Ia merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di didalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan

18 Umer Chapra *Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world?* (*The Journal of Socio-Economics* 37 2008) h. 837-838

reorientasi keseluruhan sistem sosial dan ekonomi, dan peningkatan spritualitas, menurut ajaran islam”¹⁹

Hasil penelitian ini juga sama dengan Penelitiannya Muhammad Bintang dkk (2015) menyatakan faktor - faktor yang memengaruhi secara positif dan signifikan indeks pembangunan dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Al- Ghazali adalah *Hifz 'Aql* yang diwakili Anggaran Pendidikan dan *Hifz Māl (Wealth)* dalam hal ini diwakili income perkapita sementara itu variabel yang memiliki pengaruh negative dan sangat signifikan adalah Index gini ratio khususnya di negara negara OKI²⁰

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pencapaian kesejahteraan Non Material (NMW) dapat berkontribusi terhadap *Islamic Human Development Index* di Indonesia mengisyaratkan bahwa kesejahteraan yang ditujukan untuk pencapaian *maslahah* yang ada dalam lima tujuan *Maqhasid Syariah* yaitu *Hifz Din* (Pemeliharaan Agama) *Hifz Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Hifz Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), *Hifz Aql* (Pemeliharaan Akal) lebih dapat memberi sumbangan pada pembentukan pembangunan Manusia Islami (*Islamic Human Develepment Index*) di Indonesia artinya adalah bahwa aplikasi penerapan nilai-nilai agama, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat adalah faktor dominan untuk mencapai kesejahteraan, sementara itu kesejahteraan material (*Hifz Maal*) yang diwakili pendapatan belum bisa memberi sumbangan berarti pada pembentukan index, dimana seperti yang kita ketahui tingkat gini rasio provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2017 masih berada pada level 0,5% yaitu criteria sedang. Padahal Pendapatan perkapita penduduk dapat dikategorikan merata bila gini rasio-nya mendekati 0²¹.

Kesejahteraan non material itu jauh lebih utama jika dibandingkan dengan kesejahteraan material, karena jika manusia bahagia jiwanya dengan adanya ketaatan pada Allah (*Hifz Al Din*), kemampuan intelektual (*Hifz Al Aql*), kesehatan (*Hifz Nasl*, dan *Hifz Nafs*) maka kesejahteraan material akan segera menyusul setelah itu, dan begitu juga sebaliknya bahwa kesejahteraan non material (spiritual, kesehatan, pendidikan) akan didapatkan dengan adanya pemenuhan kebutuhan terhadap kesejahteraan material (kekayaan dan pendapatan)²²

19 Sadeq, Abul Hasan, *Development Issues in Islam*, (International Islamic University Malaysia 2016

20 Bintang ed.all. *Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqāṣid syarī'ah al-ghazali -Studi kasus: Negara-negara OKI. (ResearchGate: Eksyar, Volume 02, Nomor 02, November 2015) 512-534 h. 521..lihat juga Ruta Ciutiene and Rasa Lailaite. A Development of Human Capital in the Context of an Aging. Procedia – Social and Behaviour Sciences p. 753- 757. 2015*

21 <http://www.Bps.go.id> (2008

22 *Ibid.. Umar Chapra... The IslamicVision..h.3*

Manusia tidak usah takut kehilangan rezeki dari Allah, karena sudah dijamin, yang jadi persoalan apakah manusia mau berusaha keras untuk memperbaiki dirinya dan berusaha mencari penghidupan yang halal maka Allah akan selalu mencukupi. Demikian juga kalau suatu negara diatur dan dikelola berdasarkan syariat dan ketentuan Allah otomatis Allah akan menganugerahkan kesejahteraan kepada negara tersebut.²³ Walaupun kesejahteraan Non Material lebih dominan dalam pembentukan IHDI di Indonesia, akan tetapi capaian IHDI itu belum merata di semua provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan dan strategi dalam pencapaian kesejahteraan yang jauh dari kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pembangunan manusia di Indonesia dengan pendekatan *Maqhasid Syariah* belum berhasil sepenuhnya dapat menjelaskan keberhasilan pembangunan Indonesia, hampir 80 % provinsi yang berada pada *Islamic Human Development Index* rendah.
- b. Faktor dominan yang mempengaruhi IHDI di Indonesia adalah Kesejahteraan Non Material (NMW). Adanya variasi capaian yang lebih besar dari Non Material Welfare Index (NMW) dibandingkan Material Welfare (MW) menunjukkan bahwa, pendidikan, kesehatan, dan tingkat religiusitas masih lebih dapat memberi sumbangan pada pembentukan IHDI di Indonesia.

2. Saran

- a. Peningkatan Kinerja Anggaran bidang Pendidikan dan Kesehatan di seluruh Indonesia, yang ditandai dengan naiknya capaian indikator bidang pendidikan dan kesehatan yaitu meningkatnya tingkat melek huruf, lama bersekolah (*Schooling Index*) dan tingkat harapan hidup (*Life Expectancy Index*) dari penduduk yang pada akhirnya meningkatnya IHDI yang berkesinambungan setiap provinsi di Indonesia
- b. Peningkatan aspek kesejahteraan non material ini akan mendorong kesadaran moral, intelektualitas, spritualitas dan pada intinya kesehatan jiwa dan raga. Apabila negara bisa membangun kesejahteraan non material masyarakatnya otomatis akan berimbas pada kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan materialnya yaitu pendapatan

23 Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta : Rajawali Press) 2016...h. 14

per kapita yang tinggi dan kemakmuran. Tujuan pembangunan ini sebenarnya sudah Allah *Subahana huwata'ala* kemukakan dalam QS. Al A'raf (7:96) yaitu :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)

*Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*²⁴

Begitu pentingnya meraih takwa agar Allah *Subahana huwata'ala* membuka keberkahan dan setiap usaha pembangunan, tapi manusia selalu lebih bersedia menuruti hawa nafsunya. Menjalankan pembangunan untuk mencapai *maslahah* adalah merupakan hasil dari kesadaran kolektif dari semua penduduk di suatu negara untuk meraihnya. Maka tidak hanya peran pemerintah yang harus selalu dituntut akan tetapi konsep *Assabiyyah*²⁵ (solidaritas) dari Ibnu Khaldun sangat relevan untuk diimplementasikan di abad modern ini.

²⁴ QS. Al A'raf (7:96)

²⁵ *Assabiyyah* artinya *Asabiyyah* adalah istilah yang digunakan Ibnu Khaldun dalam menggambarkan adanya rasa solidaritas sosial atau juga *social capital* dalam pembangunan yaitu kerjasama antara elemen masyarakat, saling adanya kepercayaan, menerapkan pembagian kerja, dan menunjukkan kinerja mereka di semua lini pembangunan adalah modal yang kuat bagi suatu negara guna membangun peradaban. Solidaritas ini hanya akan diperoleh jika penguasa (G) dan masyarakat (N) dapat menjalankan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid 2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
- Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI (Semarang : Cv. As Syifa)
2001
- Bintang ed.all. *Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqāsid syarī'ah al-ghazali -Studi kasus: Negara-negara OKI. (ResearchGate: Eksyar, Volume 02, Nomor 02, November2015)*
- Beik, Irfan Syauki dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta : Rajawali Press, 2016
- Chapra, Umer. *Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world?* (The Journal of Socio- Economics 37. 2008)
- The Islamic Vision of Development in the Light of *Maqāsid Al-Sharī'ah*. (Working paper, researcGate 2008)
- Ciutiene, Ruta and Rasa Lailaite. *A Development of Human Capital in the Context of an Aging*. *Procedia – Social and Behaviour Sciences* p. 753- 757. 2015
- Cooper dan Emory. *Metode Penelitian Bisnis*. (Erlangga. Jakarta. 1997)
- Hasani, Ismail. *Nadhariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad al-Thahir bin 'Asyur*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995).
- Hasan, Zubair, *Review of M. U. Chapra's 'Islam and Economic Development'* I I U M Journal of Islamic Economics, 4(1 and 2) 1995
- Hendri Anto MB." *Introduction an Islamic human development Indeks (I- HDI) to Measure Development in OIC Countries"* (IRTI journal, Vol. 19 No. 2 2010
- Human Development Index Statistical* (UNDP Report 2018)
- Miraç Eren and Selahattin Kaynak. *An evaluation of EU member states according to human development and global competitiveness dimensions using the multi- p e r i o d grey relational analysis (MP-GRA) technique* Application Vol. 7 No1, 2017 pp. 60-70 © Emerald Publishing Limited
- Mirakhor, Abbas "A Note on Islamic Economics," (Islamic Research and Training Institute, IDB Lecture Series No.20. Islamic Development Bank , 2007)

- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan kuantitatif (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Rafsanjani, Haqiqi. *Islamic Human Development Index di Indonesia*. (Malang Repository Universitas Brawijaya library. TESIS 2014)
- Ruzita Mohd Amin dkk. *The Integrated Development Index (I- Index) a new comprehensive approach to measuring human Development*, (ResearchGate , Blomsbury Qatar Foundations journal vol.2 thn 2015)
- Sadeq, Abul Hasan, *Development Issues in Islam*, (International Islamic University Malaysia 2016)
- Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning Implications and Policy Concerns*”, (Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 2006)Vol. 19, No. 1, h: 3-18
- Salim al-Awwa, Muhammad *Daur al-Maqasid fi al-Tasyri’at al-Mu’asirah*. (Kairo: al-Maqasid Research Center, 2006).
- Todaro P. Michael dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi* (Penerbit : Erlangga Jakarta 2006) edisi Sembilan jilid 1

[Http://www.bps.co.id](http://www.bps.co.id)